

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix
INTISARI	xiii
ABSTRACT	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Keaslian Penelitian	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. Tinjauan Umum tentang Jabatan Notaris.....	19
1. Pengertian Jabatan Notaris	19
2. Kewenangan Notaris	22
3. Kewajiban Notaris	25
4. Akta Notaris	28
B. Tinjauan Umum tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).....	30
1. Pengertian Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)	30

2. Klasifikasi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)	31
3. Tugas, Kewenangan, dan Kewajiban Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)	32
4. Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)	37
C. Tinjauan Umum tentang Hibah Wasiat.....	40
1. Pengertian Hibah Berdasarkan Hukum Islam, Hukum Adat, dan HukumPerdata	41
2. Pengertian Wasiat Berdasarkan Hukum Islam, Hukum Adat, dan Hukum Perdata.....	51
3. Pengertian Hibah Wasiat.....	59
D. Tinjauan Umum tentang Pajak.....	65
1. Pengertian Pajak.....	65
2. Fungsi Pajak.....	66
3. Klasifikasi Pajak.....	66
4. Asas Perpajakan	68
5. Syarat Pemungutan Pajak.....	70
6. Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	71
E. Tinjauan Umum tentang Peraturan Perundang-Undangan	75
1. Pengertian Peraturan Perundang-Undangan	75
2. Asas Peraturan Perundang-Undangan.....	78
3. Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan	85
BAB III METODE PENELITIAN	92
A. Jenis Penelitian	92

B. Sifat penelitian	93
C. Jenis Data	93
1. Data Primer	94
2. Data Sekunder	94
D. Cara Pengumpulan Data	97
E. Lokasi Penelitian	98
F. Subyek Penelitian.....	98
1. Responden.....	99
2. Narasumber	100
G. Jalannya Penelitian.....	100
1. Tahap Persiapan	100
2. Tahap Pelaksanaan.....	101
3. Tahap Penyelesaian.....	101
H. Analisis Data	101
I. Hambatan Penelitian	102
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	103
A. Kajian Yuridis Pembayaran Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) atas Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan karena Hibah Wasiat Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan Peraturan Pelaksananya di Daerah Istimewa Yogyakarta	103
B. Pelaksanaan Pembayaran Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) atas Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	

karena Hibah Wasiat oleh Penerima Wasiat dihadapan Notaris di Daerah

Istimewa Yogyakarta 165

BAB V PENUTUP 194

A. Kesimpulan 194

B. Saran 195

DAFTAR PUSTAKA 197